

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

Aktor-Aktor Kebijakan &
Mapping Stakeholders



KELOMPOK 1

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Julia Wulandari | (1916041029) |
| 2. Anada Syofira | (1946041005) |
| 3. Jimmy Enmo S. Situmorang | (1916041023) |
| 4. Katarina Esti Wulandari | (1916041009) |
| 5. Eldo Noprizal | (1816041081) |
| 6. Nicholas Hansori | (1946041001) |

TABLE of CONTENTS

01

Definisi Aktor Kebijakan

02

**Aktor Dalam
Formulasi Kebijakan
Publik Menurut Ahli**

03

**Golongan atau Tipe Aktor
Kebijakan Publik**

04

**Peran Aktor
Kebijakan**

05

**Aktor Kebijakan
Publik di Indonesia**

06

**Stakeholders
Mapping**

DEFINISI AKTOR KEBIJAKAN

(Menurut Ahli)



Menurut Howlett dan Ramesh:

Menjelaskan pada prinsipnya aktor kebijakan adalah mereka yang selalu dan harus terlibat dalam setiap proses analisa kebijakan publik, baik berfungsi sebagai perumus maupun kelompok penekan yang senantiasa aktif dan proaktif di dalam melakukan interaksi dan interelasi di dalam konteks analisis kebijakan publik.

Menurut Winarno (2012:126):

Aktor kebijakan publik dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni para pemeran resmi dan para pemeran tidak resmi. Yang termasuk kedalam pemeran resmi adalah agen-agen pemerintah (birokrasi), presiden (eksekutif), legislatif, dan yudikatif. Sedangkan yang termasuk kedalam kelompok pemeran tidak resmi meliputi : kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, dan warga negara individu.

Menurut James Anderson, aktor kebijakan dibagi dalam 2 peran yaitu pelaku resmi dan tidak resmi:

1. Pelaku resmi adalah, pemerintah yang terdiri atas legislatif, eksekutif dan yudikatif. Legislatif adalah lembaga yang bertugas merumuskan dan membentuk kebijakan berupa undang-undang dan menjadi sebuah kebijakan dalam menjadi payung hukum bagi pembuat kebijakan publik pada level berikutnya seperti intruksi presiden.
2. Pelaku tidak resmi, berasal dari luar lembaga pemerintah seperti kelompok kepentingan, partai politik, organisasi massa sama warga negara dan individu. Pelaku ini tidak mempunyai peran dalam pengambilan keputusan kebijakan tetapi berperan dalam memberikan saran usul atau masukan.

Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Publik

(Menurut Ahli)

02



Kebijakan Publik memiliki 3 Proses yang dilalui yaitu :

Menurut Moore (1995) dalam Fauzi dan Rostyaningsih (2018) jika dilihat secara umum para aktor yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi 3 aktor yaitu : *aktor publik, aktor private, dan aktor masyarakat*. Secara garis besar ketiga aktor tersebut dikatakan sangat berperan dalam proses formulasi kebijakan publik.



Menurut Winarno (2007) dalam Anggara (2014) mengatakan bahwasanya aktor-aktor yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan publik dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok aktor resmi dan kelompok tidak resmi. Kelompok aktor terdiri dari agen-agen pemerintah dalam hal ini birokrasi, presiden (eksekutif), legislatif, yudikatif. Sedangkan kelompok tidak resmi meliputi kelompok kepentingan, partai politik, serta warga negara individu.

Golongan/Tipe Aktor Kebijakan Publik

03

Menurut Charles O. Jones dalam Solichin Abdul Wahab (2004:29), ada 4 golongan atau tipe aktor kebijakan (pelaku) yaitu :



**Golongan
Rasionalis**



**Golongan
Inkrementalis**



**Golongan
Teknisi**



**Golongan Reformis
(Pembaharu)**

Aktor Kebijakan Publik Di Indonesia

04



MPR

Perannya adalah menetapkan UUD, menetapkan TAP MPR, dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)



DPR

Perannya adalah untuk membentuk Undang-undang bersama dengan Presiden



PRESIDEN

Tugasnya untuk membentuk UU dengan persetujuan DPR, dan menetapkan Peraturan Presiden pengganti Perpu



PEMERINTAH

Presiden, Menteri, Lembaga pemerintah non-departemen, direktorat jendral, badan-badan negara, Pemprov, Pemkot/Pemkab.



Kepala Desa

menetapkan peraturan dari keputusan desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD).



DPD (Provinsi, Kota/Kab)

dan Badan Perwakilan Desa

Peran Aktor Kebijakan Publik

05

1. Legislatif
2. Eksekutif
3. Yudikatif
4. Instansi Pemerintah
5. Lembaga Peradilan

Stakeholders Mapping

06

A. KONSEP STAKEHOLDERS MAPPING

Freeman dalam Andriyanto dan Purnaweni mengatakan bahwasannya:

Stakeholder merupakan seseorang atau sekelompok orang yang termasuk dalam pihak-pihak yang memiliki pengaruh baik mempengaruhi maupun dipengaruhi atau dengan kata lain yang menerima dampak atas suatu keputusan kebijakan yang diambil.

Menurut WHO (2007) dalam Lembaga Administrasi Negara (2015) stakeholders mapping atau disebut dengan pemetaan kelompok kepentingan adalah sebuah teknik yang dilakukan guna melakukan sebuah identifikasi dan penilaian kepentingan dari pada pihak-pihak kunci, kelompok, maupun institusi, yang mana para pihak tersebut dapat mempengaruhi tercapainya kesuksesan sebuah kegiatan. Karena pemetaan stakeholders dilakukan untuk memahami bagaimana sebenarnya peran potensial serta pola hubungan dari pada aktor yang mungkin terlibat dalam sebuah proses kebijakan (Lembaga Administrasi Negara, 2015).

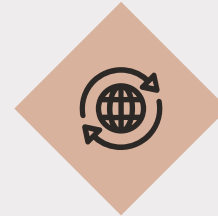
■ **Fungsi stakeholders mapping**
bagi para aktor dalam proses
formulasi kebijakan publik,
yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang dianggap sebagai aktor penting dalam sebuah proses kebijakan.
2. Berfungsi untuk melihat dan mempelajari bagaimana pengetahuan, kepentingan, posisi, serta sikap faktor-faktor tersebut terhadap kebijakan.

April						
Mon	Tue	Web	Thu	Fri	Sat	Sun
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

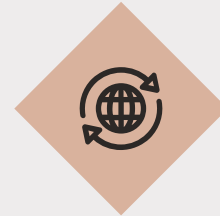
■ Stakeholders Mapping memiliki *manfaat* bagi para analis kebijakan dalam melakukan analisis kebijakan publik, yaitu:

1. Mempelajari kepentingan, pengetahuan, posisi, sikap pihak stakeholders kebijakan.
2. Mempelajari interaksi dan hubungan antara para stakeholders tersebut, serta membangun relasi dengan stakeholders.
3. Selain dua hal tersebut, pemetaan stakeholders juga dapat bermanfaat dalam mengetahui bagaimana ketertarikan para stakeholder terhadap kebijakan.
4. Dan terakhir untuk mengetahui apakah terdapat konflik dan risiko kebijakan, serta dapat mengurangi risiko kegagalan.



▪ Teori Stakeholders Mapping

Teori stakeholder adalah bahwa semakin kuat hubungan korporasi, maka akan semakin baik bisnis korporasi. Sebaliknya, semakin buruk hubungan korporasi maka akan semakin sulit. Hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan adalah berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama. Teori stakeholder adalah sebuah konsep yang dimana konsep tersebut adalah manajemen strategis yang bertujuan untuk membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal yang mengembangkan keunggulan kompetitif.



▪ Teknik Stakeholders Mapping

➤ *The participation Planning Matrix*

Teknik dari participation planning matrix secara khusus memiliki tujuan untuk merancang jenis partisipasi stakeholder yang dimana partisipasi tersebut dilaksanakan dalam bentuk bentuk yang sederhana yaitu dengan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan.

➤ *Bases of Power and Directions of Interest Diagram*

Diagram yang dimaksud ialah bertujuan untuk melihat sumber atau basis kekuasaan atau wewenang dan kepentingan yang hendak dicapai. Power yang dimaksud adalah dari anggaran, pendanaan, dukungan massa atau pengendalian berbagai jenis control atau sanksi.

➤ *Stakeholder Issue Interrelationship Diagram*

Teknik ini digunakan untuk menganalisis hubungan berbagai jenis stakeholder yang berkaitan dengan isu kebijakan dan bagaimana stakeholder berhubgan satu sama lain dan juga teknik itu juga dapat mengetahui bagaimana potensi kerjasama dan konflik antar stakeholder.



➤ **Problem-Frame Stakeholder Map**

Teknik ini digunakan untuk memahami terkait permasalahan dan dapat membantu membangun koalisi pemenang.

➤ **Policy Implementation Mapping**

Teknik ini digunakan untuk mengetahui dengan cepat tentang siapa dan apa yang dinilai secara etika karena teknik ini juga membantu memenuhi aspek deontological dan teleological yang dimana hasilnya nanti dapat menunjukkan proposal dan pilihan yang harus di hilangkan berdasarkan pertimbangan etis.

➤ **Power Versus Interest Grid**

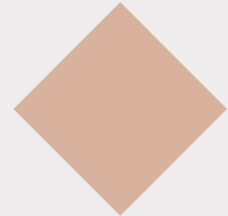
Power serta interest menjadi fokus utama dalam teknik analisis model grid. Power dapat berasal dari potensi stakeholder untuk mempengaruhi kebijakan atau organisasi yang berasal dari kekuasaan berbasis kedudukan atau sumber daya mereka dalam organisasi, atau mungkin pengaruh mereka yang berasal dari kredibilitas mereka sebagai pemimpin atau ahli.

➤ **Value Orientation Mapping**

Model ini dikembangkan oleh The Victorian Department of Primary Industries pada tahun 2007 (Kennon, 2009). Menurut Kennon terdapat 4 langkah, diantaranya: identifikasi, analisis, pemetaan, dan menentukan prioritas.

➤ Net Map

Net-Map merupakan sebuah metode pemetaan stakeholder yang dapat membantu pembuat kebijakan untuk mengetahui, memvisualisasikan, berdiskusi serta mengembangkan pemahaman terhadap situasi di mana ada banyak aktor kepentingan yang berbeda pengaruh dan kepentingannya terhadap organisasi mereka (Bryson, 2003).



Contoh Kasus

Pada Kajian yang dilakukan oleh OECD PISA (Organisation for Economic Cooperation and Development - Programme for International Student Assessment) terhadap 510.000 pelajar usia 15 tahun di 65 negara dalam hal kompetensi membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan, pelajar Indonesia dalam ketiga bidang tersebut ternyata berada jauh di bawah rata-rata. Selain itu UNICEF menyatakan Indonesia memiliki permasalahan balita *stunting* dan peningkatan obesitas pada balita.

Pada tahun 2010, diluncurkan gerakan global, yang disebut *Scaling Up Nutrition movement* atau SUN Movement oleh Sekjen PBB. SUN movement merupakan dorongan global untuk memperbaiki gizi bagi semua, terutama untuk perempuan dan anak-anak, dalam hal ini pemerintah kota Semarang melaksanakan gerakan perbaikan status kesehatan dengan fokus terhadap kelompok 1000 hari pertama kehidupan pada tataran global (Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan dan disingkat Gerakan 1000 HPK). Dengan demikian dibutuhkan penyusunan alternatif untuk strategi penguatan kapasitas terhadap kebutuhan dan/permasalahan dari *stakeholder* yang ada.

Contoh Kasus

Maka dari itu dilakukan pemetaan *stakeholder* atau stakeholders mapping, dengan hasil berikut:

- DPRD Kota Semarang dan BAPPEDA Kota Semarang termasuk ke dalam kelompok pengambil keputusan dengan kategori “Penyelamat” yaitu sikap pemimpin yang cenderung mendukung, mempunyai pengaruh kuat dan bersedia untuk terlibat aktif didalamnya.
- Sektor kesehatan, Dinas Kesehatan menunjukkan posisi “penyelamat”, dimana *stakeholder* ini memiliki sikap yang mendukung, pengaruh kuat dan keterlibatan aktif. yang artinya sektor ini paling siap untuk program 1000 HPK sesuai dengan indikator proses yang telah ditetapkan di Kota Semarang.
- Dinas Pendidikan Kota Semarang, dan perwakilan akademisi, dimana masingmasing instansi berperan sebagai “Kawan” pada indikator proses Partisipasi Pemangku Kepentingan. Yaitu para *stakeholder* tersebut diposisikan sebagai orang kepercayaan atau penasihat.
- DIKNAS Kota Semarang berada diposisi “Bom Waktu”, hal tersebut dikarenakan pengaruh yang cukup kuat dimiliki oleh *stakeholder* tersebut untuk melakukan diseminasi informasi terkait kesehatan reproduksi dan perilaku hidup sehat dikalangan anak sekolah.



THANK U!